



Judul : Harga Mineral Melonjak, Produksi Batu Bara Bisa Genjot PNBP
Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Harga Mineral Melonjak

Produksi Batu Bara Bisa Genjot PNBP

ANGGOTA Komisi VII DPR Rohk Hananto mendorong pemerintah meningkatkan pendapatan negara melalui sektor mineral dan batubara. Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam untuk kemashlahatan bangsa. Pemerintah bersama pelaku usaha, dan masyarakat harus terus melakukan pengelolaan yang baik dalam pelaksanaan EITI ini merupakan wujud bahwa penerapan *good governance* industri ekstraktif sudah dilakukan di EITI juga telah memberikan dampak positif bagi pengelolaan sumber daya alam. Melalui penerapan EITI itu, berharap, EITI menjadi lebih transparansi adalah sebuah



ANGGOTA Komisi VII DPR Rofik Hananto mendorong pemerintah meningkatkan pendapatan negara melalui sektor mineral dan batu bara. Kenaikan sejumlah bahan energi seperti batu bara harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menggenjot Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Rofik menuturkan, kenaikan harga batu bara saat ini cukup tinggi lantaran permintaan naik. Tercatat, per Juli 2021, harga acuan banyak (HBA) mencapai 115,35 dolar AS per ton, jauh lebih tinggi daripada harga rata-rata di 2020 sebesar 58,17 dolar AS per ton.

“Diperkirakan harga ini akan bertahan dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi oleh negara-negara konsumen banyak,” kata Rofik di Jakarta, kemarin.

Kenaikan harga ini, sambung Rofik, tentu merupakan peluang besar untuk meningkatkan PNBP Minerba di tahun 2021. Untuk itu, dia berharap kinerja produksi dari semua tambang harus dioptimalkan, namun tetap dalam kaidah-kaidah pertambangan yang baik.

“Jangan sampai ketika produksi batu bara dan mineral lainnya di-genjot, justru menimbulkan kerusakan lingkungan,” kata Rofik.

Terpisah, Komisioner Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menuturkan pentingnya transparansi dalam pe-

ngelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan bangsa. Pemerintah bersama pelaku usaha, dan masyarakat harus terus saling berkolaborasi mengelola sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Itu yang harus menjadi fokus kita bersama-sama,” kata Satya saat menjadi *keynote speaker* webinar bertajuk Transparansi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kepada Publik Sebagai Upaya *Good Governance* di Jakarta, kemarin.

Acara digelar Kementerian ESDM bekerja sama dengan Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia.

Satya menuturkan, transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif dimulai tahun 2007 dengan dukungan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada perwakilan EITI Indonesia. Dukungan kemudian setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Walhasil, pada 2014 Indonesia menjadi negara pertama ASEAN yang memenuhi persyaratan (*compliance*) standar EITI Internasional.

“Keikutsertaan Indonesia da-

lam pelaksanaan EITI ini merupakan wujud bahwa penerapan *good governance* industri ekstraktif sudah dilakukan di Indonesia,” kata Satya.

Dalam melaksanakan EITI, jelas Satya, pemerintah berkomitmen mengungkapkan semua pajak, royalti dan biaya yang diterima dari kegiatan usaha minyak, gas dan pertambangan. Keikutsertaan Indonesia dalam

EITI juga telah memberikan dampak positif bagi pengelolaan sumber daya alam.

Melalui penerapan EITI itu, pemerintah dapat meningkatkan sistem *good governance* dan akuntabilitas publik, perbaikan iklim investasi, dan membuka peluang untuk mengakses bantuan dana internasional.

Sementara, mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas

berharap, EITI Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. EITI adalah sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif termasuk di dalamnya minyak, gas, mineral dan batu bara.

“Indonesia tidak hanya memproduksi laporan yang berkualitas, namun juga bagaimana bisa menjawab persoalan dan tantangan sektor ini yang kian dinamis dan kompleks,” katanya. ■ **KAL**